



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 45

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber padapatan desa adalah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdampak pada penurunan Dana Desa yang diterima sebagian Desa di Daerah;
- d. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan memberikan tambahan pendapatan bagi desa yang mengalami penurunan penerimaan dana desa sebagaimana huruf c, perlu memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Umum Kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2015;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM KEPADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Kabupaten Magelang.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Magelang kepada Pemerintahan Desa yang berwujud uang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM KEPADA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa.

- (2) Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menanggulangi dan mengurangi kemiskinan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan:
- a. keseimbangan antara Belanja Desa yaitu paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. besarnya penurunan Dana Desa yang diterima desa sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
 - c. besarnya penurunan Alokasi ADD untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa sebagai akibat penetapan alokasi ADD dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dalam hal 1 (satu) desa memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada desa tersebut menggunakan hasil perhitungan yang tertinggi.
- (3) Rincian besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum sesuai alokasi masing-masing Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015; dan
 - b. bukti penerimaan bantuan keuangan.
- (2) Camat mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Bupati c.q. Bagian Tata Pemerintahan dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi bantuan keuangan masing-masing desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015; dan
 - c. bukti penerimaan bantuan keuangan.
- (3) Bagian Tata Pemerintahan mengajukan pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum bagi Pemerintahan Desa kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, dengan dilampiri:
 - a. fotocopy Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa; dan
 - b. bukti penerimaan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Pemerintahan Desa untuk masing-masing desa.
- (4) Berdasarkan permohonan pencairan dari Bagian Tata Pemerintahan, PPKD mencairkan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Pemerintahan Desa ke rekening masing-masing Pemerintahan Desa

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa merupakan penerimaan Desa yang dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jenis belanja pegawai.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa sesuai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan APBDesa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 November 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 45
pada tanggal 8 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 45 TAHUN 2015
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
 UMUM KEPADA PEMERINTAHAN DESA
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN YANG
 BERSIFAT UMUM KEPADA PEMERINTAHAN DESA
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

| NO. | KECAMATAN | DESA | BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA PEMERINTAHAN DESA (RP) |
|-----|-----------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SALAMAN | NGARGORETNO | 8.832.000 |
| 2 | SALAMAN | PARIPURNO | 13.209.000 |
| 3 | SALAMAN | KALIREJO | 59.934.000 |
| 4 | SALAMAN | MENOREH | 66.585.000 |
| 5 | SALAMAN | NGADIREJO | 46.760.000 |
| 6 | SALAMAN | SIDOMULYO | 30.941.000 |
| 7 | SALAMAN | KEBONREJO | 19.377.000 |
| 8 | SALAMAN | SALAMAN | 5.490.000 |
| 9 | SALAMAN | KALISALAK | 50.875.000 |
| 10 | SALAMAN | SRIWEDARI | 33.842.000 |
| 11 | SALAMAN | JEBENGSARI | 19.284.000 |
| 12 | SALAMAN | TANJUNGANOM | 17.781.000 |
| 13 | SALAMAN | PURWOSARI | 8.826.000 |
| 14 | SALAMAN | NGAMPELDENTO | 8.826.000 |
| 15 | SALAMAN | SIDOSARI | 3.000.000 |
| 16 | SALAMAN | SAWANGARGO | 22.076.000 |
| 17 | SALAMAN | KRASAK | 29.572.000 |
| 18 | SALAMAN | KALIABU | 12.391.000 |
| 19 | BOROBUDUR | GIRIPURNO | 22.582.000 |
| 20 | BOROBUDUR | GIRITENGAH | 5.000.000 |
| 21 | BOROBUDUR | TUKSONGO | 10.981.000 |
| 22 | BOROBUDUR | MAJAKSINGI | 5.000.000 |
| 23 | BOROBUDUR | BIGARAN | 10.854.000 |
| 24 | BOROBUDUR | SAMBENG | 10.920.000 |
| 25 | BOROBUDUR | CANDIREJO | 45.859.000 |
| 26 | BOROBUDUR | NGARGOGONDO | 23.903.000 |
| 27 | BOROBUDUR | WANUREJO | 36.840.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------|--------------|------------|
| 28 | BOROBUDUR | BOROBUDUR | 32.688.000 |
| 29 | BOROBUDUR | KARANGANYAR | 5.000.000 |
| 30 | BOROBUDUR | KARANGREJO | 12.655.000 |
| 31 | BOROBUDUR | NGADIHARJO | 32.536.000 |
| 32 | BOROBUDUR | KEBONSARI | 12.464.000 |
| 33 | BOROBUDUR | KEMBANGLIMUS | 27.682.000 |
| 34 | BOROBUDUR | WRINGINPUTIH | 30.668.000 |
| 35 | NGLUWAR | BLIGO | 43.024.000 |
| 36 | NGLUWAR | PAKUNDEN | 26.901.000 |
| 36 | NGLUWAR | SOMOKATON | 10.917.000 |
| 37 | NGLUWAR | NGLUWAR | 38.831.000 |
| 38 | NGLUWAR | KARANGTALUN | 38.781.000 |
| 39 | NGLUWAR | JAMUSKAUMAN | 42.421.000 |
| 40 | NGLUWAR | PLOSOGEDE | 23.284.000 |
| 41 | NGLUWAR | BLONGKENG | 8.826.000 |
| 42 | SALAM | SALAM | 57.790.000 |
| 43 | SALAM | SUCEN | 30.110.000 |
| 44 | SALAM | KADILUWIH | 15.239.000 |
| 45 | SALAM | JUMOYO | 48.782.000 |
| 46 | SALAM | TIRTO | 21.574.000 |
| 47 | SALAM | TERSAN GEDE | 25.141.000 |
| 48 | SALAM | SIRAHAN | 24.989.000 |
| 49 | SALAM | SELOBORO | 6.171.000 |
| 50 | SALAM | GULON | 80.211.000 |
| 51 | SRUMBUNG | SUDIMORO | 11.968.000 |
| 52 | SRUMBUNG | TEGALRANDU | 4.000.000 |
| 53 | SRUMBUNG | KAMONGAN | 4.000.000 |
| 54 | SRUMBUNG | JERUKAGUNG | 6.741.000 |
| 55 | SRUMBUNG | KRADENAN | 32.066.000 |
| 56 | SRUMBUNG | BANYUADEM | 12.903.000 |
| 57 | SRUMBUNG | SRUMBUNG | 21.892.000 |
| 58 | SRUMBUNG | BRINGIN | 27.536.000 |
| 59 | SRUMBUNG | MRANGGEN | 31.579.000 |
| 60 | SRUMBUNG | NGARGOSOKO | 4.000.000 |
| 61 | SRUMBUNG | POLENGAN | 4.000.000 |
| 62 | SRUMBUNG | PUCANGANOM | 5.000.000 |
| 63 | SRUMBUNG | KEMIREN | 4.000.000 |
| 64 | SRUMBUNG | NGLUMUT | 4.000.000 |
| 65 | DUKUN | KETUNGGENG | 32.505.000 |
| 66 | DUKUN | WATES | 39.203.000 |
| 67 | DUKUN | NGADIPURO | 42.674.000 |
| 68 | DUKUN | BANYUBIRU | 64.320.000 |
| 69 | DUKUN | BANYUDONO | 82.829.000 |
| 70 | DUKUN | DUKUN | 90.694.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------|--------------|-------------|
| 71 | DUKUN | KALIBENING | 36.608.000 |
| 72 | DUKUN | NGARGOMULYO | 37.123.000 |
| 73 | DUKUN | SUMBER | 35.132.000 |
| 74 | DUKUN | MANGUNSOKO | 8.826.000 |
| 75 | DUKUN | SEWUKAN | 10.690.000 |
| 76 | DUKUN | SENGI | 27.600.000 |
| 77 | DUKUN | PATEN | 10.483.000 |
| 78 | DUKUN | KRINJING | 22.585.000 |
| 79 | SAWANGAN | GONDOWANGI | 56.584.000 |
| 80 | SAWANGAN | SAWANGAN | 59.783.000 |
| 81 | SAWANGAN | KROGOWANAN | 33.036.000 |
| 82 | SAWANGAN | KAPUHAN | 41.469.000 |
| 83 | SAWANGAN | WONOLELO | 137.668.000 |
| 84 | SAWANGAN | BANYUROTO | 7.622.000 |
| 85 | SAWANGAN | WULUNGGUNUNG | 15.937.000 |
| 86 | SAWANGAN | GANTANG | 51.677.000 |
| 87 | SAWANGAN | JATI | 67.616.000 |
| 88 | SAWANGAN | BUTUH | 43.375.000 |
| 89 | SAWANGAN | MANGUNSARI | 17.219.000 |
| 90 | SAWANGAN | TIRTOSARI | 19.734.000 |
| 91 | SAWANGAN | PODOSOKO | 64.130.000 |
| 92 | SAWANGAN | SORONALAN | 42.036.000 |
| 93 | MUNTILAN | TANJUNG | 17.562.000 |
| 94 | MUNTILAN | SOKORINI | 31.013.000 |
| 95 | MUNTILAN | SRIWEDARI | 31.910.000 |
| 96 | MUNTILAN | CONGKRANG | 15.012.000 |
| 97 | MUNTILAN | ADIKARTO | 28.955.000 |
| 98 | MUNTILAN | MENAYU | 6.734.000 |
| 99 | MUNTILAN | KEJI | 54.740.000 |
| 100 | MUNTILAN | NGAWEN | 51.149.000 |
| 101 | MUNTILAN | GUNUNGPRING | 23.680.000 |
| 102 | MUNTILAN | PUCUNGREJO | 25.426.000 |
| 103 | MUNTILAN | TAMANAGUNG | 28.969.000 |
| 104 | MUNTILAN | GONDOSULI | 15.973.000 |
| 105 | MUNTILAN | SEDAYU | 18.866.000 |
| 106 | MUNGKID | PROGOWATI | 32.953.000 |
| 107 | MUNGKID | NGRAJEK | 9.805.000 |
| 108 | MUNGKID | RAMBEANAK | 75.953.000 |
| 109 | MUNGKID | PAREMONO | 69.299.000 |
| 110 | MUNGKID | PABELAN | 26.177.000 |
| 111 | MUNGKID | BOJONG | 48.988.000 |
| 112 | MUNGKID | PAGERSARI | 37.942.000 |
| 113 | MUNGKID | MUNGKID | 10.857.000 |
| 114 | MUNGKID | AMBARTAWANG | 5.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------------|--------------|------------|
| 115 | MUNGKID | BUMIREJO | 38.600.000 |
| 116 | MUNGKID | SENDEN | 22.934.000 |
| 117 | MUNGKID | GONDANG | 8.212.000 |
| 118 | MUNGKID | TREKO | 5.000.000 |
| 119 | MERTOYUDAN | DEYANGAN | 32.622.000 |
| 120 | MERTOYUDAN | PASURUHAN | 57.926.000 |
| 121 | MERTOYUDAN | DONOROJO | 64.712.000 |
| 122 | MERTOYUDAN | KALINEGORO | 40.429.000 |
| 123 | MERTOYUDAN | JOGONEGORO | 29.727.000 |
| 124 | MERTOYUDAN | SUKOREJO | 48.914.000 |
| 125 | MERTOYUDAN | BONDOWOSO | 40.358.000 |
| 126 | MERTOYUDAN | DANUREJO | 36.714.000 |
| 127 | MERTOYUDAN | BANJARNEGORO | 48.934.000 |
| 128 | MERTOYUDAN | BULUREJO | 20.072.000 |
| 129 | MERTOYUDAN | MERTOYUDAN | 8.755.000 |
| 130 | TEMPURAN | RINGINANOM | 67.351.000 |
| 131 | TEMPURAN | SUMBERARUM | 58.057.000 |
| 132 | TEMPURAN | SIDOAGUNG | 46.374.000 |
| 133 | TEMPURAN | TANGGULREJO | 32.688.000 |
| 134 | TEMPURAN | KALISARI | 14.355.000 |
| 135 | TEMPURAN | GIRIREJO | 44.025.000 |
| 136 | TEMPURAN | TEMPUREJO | 34.501.000 |
| 137 | TEMPURAN | PRAJEKSARI | 15.101.000 |
| 138 | TEMPURAN | JOGOMULYO | 32.246.000 |
| 139 | TEMPURAN | GROWONG | 10.081.000 |
| 140 | TEMPURAN | TEMANGGAL | 8.826.000 |
| 141 | TEMPURAN | PRINGOMBO | 5.000.000 |
| 142 | TEMPURAN | BAWANG | 5.000.000 |
| 143 | TEMPURAN | TUGUREJO | 20.072.000 |
| 144 | KAJORAN | KWADERAN | 15.216.000 |
| 145 | KAJORAN | NGENDROSARI | 5.000.000 |
| 146 | KAJORAN | LESANPURO | 12.172.000 |
| 147 | KAJORAN | BANJARETNO | 12.222.000 |
| 148 | KAJORAN | KRINJING | 6.934.000 |
| 149 | KAJORAN | BANGSRI | 5.000.000 |
| 150 | KAJORAN | KAJORAN | 39.638.000 |
| 151 | KAJORAN | MANGUNREJO | 17.083.000 |
| 152 | KAJORAN | BAMBUSARI | 5.000.000 |
| 153 | KAJORAN | WUWUHARJO | 27.958.000 |
| 154 | KAJORAN | PANDANSARI | 8.826.000 |
| 155 | KAJORAN | PANDANRETNO | 5.118.000 |
| 156 | KAJORAN | PUCUNGROTO | 5.000.000 |
| 157 | KAJORAN | SIDOREJO | 10.477.000 |
| 158 | KAJORAN | SIDOWANGI | 10.917.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------|--------------|-------------|
| 159 | KAJORAN | SUTOPATI | 152.591.000 |
| 160 | KAJORAN | SUKOMAKMUR | 22.610.000 |
| 161 | KALIANGKRIK | KALIANGKRIK | 8.990.000 |
| 162 | KALIANGKRIK | NGAWONGGO | 24.034.000 |
| 163 | KALIANGKRIK | MUNGGANGSARI | 8.826.000 |
| 164 | KALIANGKRIK | NGARGOSOKO | 13.807.000 |
| 165 | KALIANGKRIK | NGENDROKILO | 8.826.000 |
| 166 | KALIANGKRIK | MADURETNO | 19.284.000 |
| 167 | KALIANGKRIK | TEMANGGUNG | 63.906.000 |
| 168 | KALIANGKRIK | SELOMOYO | 6.314.000 |
| 169 | KALIANGKRIK | BANJAREJO | 19.476.000 |
| 170 | KALIANGKRIK | GIRIWARNO | 17.345.000 |
| 171 | KALIANGKRIK | GIRIREJO | 37.148.000 |
| 172 | KALIANGKRIK | BALEREJO | 8.826.000 |
| 173 | KALIANGKRIK | BESERAN | 6.734.000 |
| 174 | KALIANGKRIK | KETANGI | 28.837.000 |
| 175 | KALIANGKRIK | BALEKERTO | 71.012.000 |
| 176 | BANDONGAN | BANDONGAN | 19.284.000 |
| 177 | BANDONGAN | SALAMKANCI | 17.560.000 |
| 178 | BANDONGAN | SUKODADI | 32.622.000 |
| 179 | BANDONGAN | TONOBOYO | 20.957.000 |
| 180 | BANDONGAN | GANDUSARI | 30.614.000 |
| 181 | BANDONGAN | SIDOREJO | 17.721.000 |
| 182 | BANDONGAN | TRASAN | 18.817.000 |
| 183 | BANDONGAN | BANYUWANGI | 44.693.000 |
| 184 | BANDONGAN | KEDUNGSARI | 17.980.000 |
| 185 | BANDONGAN | SUKOSARI | 8.179.000 |
| 186 | BANDONGAN | KEBONAGUNG | 23.143.000 |
| 187 | BANDONGAN | KALEGEN | 16.495.000 |
| 188 | BANDONGAN | NGEPANREJO | 35.578.000 |
| 189 | BANDONGAN | REJOSARI | 110.745.000 |
| 190 | CANDIMULYO | SUROJOYO | 13.009.000 |
| 191 | CANDIMULYO | TEMPAK | 14.597.000 |
| 192 | CANDIMULYO | SIDOMULYO | 5.000.000 |
| 193 | CANDIMULYO | MEJING | 26.648.000 |
| 194 | CANDIMULYO | PURWOREJO | 22.043.000 |
| 195 | CANDIMULYO | CANDIMULYO | 5.000.000 |
| 196 | CANDIMULYO | GIYANTI | 5.070.000 |
| 197 | CANDIMULYO | TEGALSARI | 12.314.000 |
| 198 | CANDIMULYO | TAMPIR KULON | 36.147.000 |
| 199 | CANDIMULYO | KEBONREJO | 5.000.000 |
| 200 | CANDIMULYO | TAMPIRWETAN | 5.000.000 |
| 201 | CANDIMULYO | TEMBELANG | 17.192.000 |
| 202 | CANDIMULYO | SONOREJO | 15.992.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------------|-----------------|-------------|
| 203 | CANDIMULYO | TRENTEN | 24.647.000 |
| 204 | CANDIMULYO | BATEH | 39.643.000 |
| 205 | CANDIMULYO | SURODADI | 70.511.000 |
| 206 | PAKIS | PAKIS | 53.599.000 |
| 207 | PAKIS | BANYUSIDI | 124.606.000 |
| 208 | PAKIS | LOSARI | 6.061.000 |
| 209 | PAKIS | DASEH | 6.734.000 |
| 210 | PAKIS | GUMELEM | 19.873.000 |
| 211 | PAKIS | KAPONAN | 42.757.000 |
| 212 | PAKIS | KRAGILAN | 32.780.000 |
| 213 | PAKIS | KETUNDAN | 105.060.000 |
| 214 | PAKIS | DALEMAN KIDUL | 24.797.000 |
| 215 | PAKIS | PETUNG | 30.958.000 |
| 216 | PAKIS | BAWANG | 4.000.000 |
| 217 | PAKIS | REJOSARI | 8.647.000 |
| 218 | PAKIS | MUNENG WARANGAN | 8.826.000 |
| 219 | PAKIS | GONDANGSARI | 25.338.000 |
| 220 | PAKIS | KENALAN | 5.000.000 |
| 221 | PAKIS | POGALAN | 56.373.000 |
| 222 | PAKIS | GEJAGAN | 22.582.000 |
| 223 | PAKIS | MUNENG | 26.839.000 |
| 224 | PAKIS | JAMBEWANGI | 32.277.000 |
| 225 | NGABLAK | NGABLAK | 30.669.000 |
| 226 | NGABLAK | TEJOSARI | 16.481.000 |
| 227 | NGABLAK | SUMBEREJO | 10.927.000 |
| 228 | NGABLAK | GIRIREJO | 32.285.000 |
| 229 | NGABLAK | PANDEAN | 13.926.000 |
| 230 | NGABLAK | BANDUNGREJO | 17.990.000 |
| 231 | NGABLAK | MADYOGONDO | 17.568.000 |
| 232 | NGABLAK | JOGOYASAN | 17.562.000 |
| 233 | NGABLAK | MAGERSARI | 8.362.000 |
| 234 | NGABLAK | KANIGORO | 5.000.000 |
| 235 | NGABLAK | SELOMIRAH | 13.590.000 |
| 236 | NGABLAK | PAGERGUNUNG | 7.978.000 |
| 237 | NGABLAK | SELOPROJO | 5.370.000 |
| 238 | GRABAG | GRABAG | 21.093.000 |
| 239 | GRABAG | SUMURARUM | 11.576.000 |
| 240 | GRABAG | BANYUSARI | 25.006.000 |
| 241 | GRABAG | KARTOHARJO | 8.826.000 |
| 242 | GRABAG | SIDOGEDE | 7.544.000 |
| 243 | GRABAG | CITROSONO | 20.967.000 |
| 244 | GRABAG | NGASINAN | 9.005.000 |
| 245 | GRABAG | BANARAN | 9.525.000 |
| 246 | GRABAG | BALEAGUNG | 16.648.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------|-------------|------------|
| 247 | GRABAG | KLEGEN | 17.562.000 |
| 248 | GRABAG | KALIPUCANG | 3.000.000 |
| 249 | GRABAG | BANJARSARI | 19.203.000 |
| 250 | GRABAG | TLOGOREJO | 6.734.000 |
| 251 | GRABAG | TIRTO | 7.607.000 |
| 252 | GRABAG | KETAWANG | 12.248.000 |
| 253 | GRABAG | SALAM | 17.192.000 |
| 354 | GRABAG | COKRO | 5.000.000 |
| 255 | GRABAG | SUGIHMAS | 45.925.000 |
| 256 | GRABAG | PESIDI | 26.525.000 |
| 257 | GRABAG | GIRIWETAN | 5.371.000 |
| 258 | GRABAG | LEBAK | 8.778.000 |
| 259 | TEGALREJO | TEGALREJO | 34.692.000 |
| 260 | TEGALREJO | SOROYUDAN | 16.152.000 |
| 261 | TEGALREJO | SIDOREJO | 41.610.000 |
| 262 | TEGALREJO | DLIMAS | 26.501.000 |
| 263 | TEGALREJO | BANYUSARI | 18.932.000 |
| 264 | TEGALREJO | SUKOREJO | 14.377.000 |
| 265 | TEGALREJO | TAMPINGAN | 41.020.000 |
| 266 | TEGALREJO | BANYUURIP | 14.110.000 |
| 267 | TEGALREJO | GLAGAHOMBO | 13.965.000 |
| 268 | TEGALREJO | DAWUNG | 8.826.000 |
| 269 | TEGALREJO | KLOPO | 15.286.000 |
| 270 | TEGALREJO | JAPAN | 26.705.000 |
| 271 | TEGALREJO | KEBONAGUNG | 41.330.000 |
| 272 | TEGALREJO | NGASEM | 6.734.000 |
| 273 | TEGALREJO | GIRIREJO | 20.133.000 |
| 274 | TEGALREJO | NGADIREJO | 17.548.000 |
| 275 | TEGALREJO | DONOROJO | 34.313.000 |
| 276 | TEGALREJO | MANGUNREJO | 13.896.000 |
| 277 | SECANG | MADUSARI | 23.743.000 |
| 278 | SECANG | MADYOCONDRO | 34.620.000 |
| 279 | SECANG | NGABEAN | 11.346.000 |
| 280 | SECANG | KRINCING | 21.656.000 |
| 281 | SECANG | CANDISARI | 32.622.000 |
| 282 | SECANG | CANDIRETNO | 30.112.000 |
| 283 | SECANG | PANCURANMAS | 24.179.000 |
| 284 | SECANG | JAMBEWANGI | 35.730.000 |
| 285 | SECANG | PAYAMAN | 32.317.000 |
| 286 | SECANG | KALIJOSO | 31.975.000 |
| 287 | SECANG | KARANGKAJEN | 5.000.000 |
| 288 | SECANG | SIDOMULYO | 11.539.000 |
| 289 | SECANG | PUCANG | 5.941.000 |
| 290 | SECANG | DONOMULYO | 12.375.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------|---------------|------------|
| 291 | SECANG | GIRIKULON | 17.451.000 |
| 292 | SECANG | PIRIKAN | 20.548.000 |
| 293 | WINDUSARI | PASANGSARI | 62.384.000 |
| 294 | WINDUSARI | CANDISARI | 15.322.000 |
| 295 | WINDUSARI | BANDARSEDAYU | 11.287.000 |
| 296 | WINDUSARI | BANJARSARI | 14.094.000 |
| 297 | WINDUSARI | BALESARI | 15.841.000 |
| 298 | WINDUSARI | KEMBANGKUNING | 21.327.000 |
| 299 | WINDUSARI | TANJUNGSARI | 9.488.000 |
| 300 | WINDUSARI | GENITO | 37.486.000 |
| 301 | WINDUSARI | KENTENGSARI | 20.072.000 |
| 302 | WINDUSARI | GIRIMULYO | 5.000.000 |
| 303 | WINDUSARI | GUNUNGSARI | 22.212.000 |
| 304 | WINDUSARI | MANGUNSARI | 15.519.000 |
| 305 | WINDUSARI | GONDANGREJO | 31.021.000 |

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN